BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Undang- undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-undang Nomor 23/1992 tentang kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, (lihat lampiran). Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan Negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Untuk itu perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan secara menyeluruh agar terwujud masyarakat yang sehat.

Dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Pemerintah sudah seharusnya bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah menetapkan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (PJKMM) yang salah satunya diwujudkan dengan pembangunan Puskesmas dan jaringannya.

Salah satu program dari Jamkesmas dengan memberikan kartu kesehatan ASKES Gakin secara gratis di setiap daerah. Program Jamkesmas disempurnakan pada tahun 2012, sebagai upaya menjamin penduduk miskin agar mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.

Pemerintah mengeluarkan anggaran yang berasal dari ASKES keluarga miskin atau anggaran pendapatan belanja daerah. Dalam pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (JPKMM) masyarakat miskin yang sudah terdata oleh pemerintah daerah akan mendapatkan kartu Jamkesmas yang dapat digunakan di Puskesmas atau Rumah Sakit yang telah di tunjuk oleh Pemerintah.

Jamkesmas non kuota yang dapat digunakan oleh masyarakat miskin yang tidak terdaftar oleh Pemerintah dalam Jamkesmas kuota yang sudah memiliki surat keterangan miskin yang harus diterbitkan oleh Lurah sesuai dengan wilayah tinggal masing-masing.

Menurut Dinas Kesehatan, surat keterangan miskin merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pasien untuk mendapatkan pelayanan jamkesmas non kuota untuk mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit. Kemudian harus dilampirkan fotokopi KTP atau KSK dan rujukan dari Puskesmas yang berisi diagnosa dokter, tanggal, nama Puskesmas dan nama Dokter.

Terdapat tujuh pembiayaan dari Pemerintah pusat yang diterima Puskesmas antara lain :

1. Biaya pelayanan dalam dan luar gedung
2. Biaya jasa pelayanan kesehatan
3. Biaya transportasi petugas
4. Biaya rawat inap
5. Biaya penanganan komplikasi kebidanan
6. Biaya jasa pelayanan dokter spesialis dan,
7. Penggunaan peralatan penunjang spesialistik

Tetapi dalam pelaksanaan Jamkesmas hanya Keluarga Miskin (GAKIN) yang masuk dalam daftar Jamkesmas yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di rumah sakit milik Pemerintah. Karena persyaratan yang rumit bagi masyarakat, banyak masyarakat yang kurang mengetahui program jaminan kesehatan tersebut.

Sasaran dari program ini adalah orang miskin atau tidak mampu dan juga gelandangan, pengemis, anak terlantar serta masyarakat miskin yang tidak mempunyai indentitas masyarakat miskin, penghuni panti-panti sosial masyarakat miskin, korban bencana pasca tanggap darurat serta masyakat miskin penghuni rumah tahanan (rutan) dan masyarakat miskin penghuni lembaga permasyarakatan (lapas).

I.2 Indentifikasi Masalah

1. Kurangnya informasi tentang program Jamkesmas kepada masyarakat
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Jamkesmas
3. Kurang pengetahuan masyarakat tentang prosedur penggunaan Jamkesmas

I.3 Fokus Permasalahan

Fokus permasalahan dari program Jamkesmas adalah masyarakat kurang memahami prosedur pengurusan Jamkesmas serta kurangnya informasi dan sosialisasi program Jamkesmas dari Pemerintah kepada masyarakat.

I.4 Tujuan Perancangan

1. Memberikan motivasi kepada masyarakat dalam mengikuti program Jamkesmas untuk memunculkan persepsi bahwa pentingnya kesehatan dalam kehidupan keluarga, dengan cara memberikan informasi mengenai kesehatan dan manfaat penting dari kesehatan.
2. Agar masyarakat mengetahui manfaat dari memiliki kartu Jamkesmas dan dapat menggunakan kartu Jamkesmas tersebut.
3. Memunculkan persepsi pentingnya kesehatan keluarga, dengan cara memberikan informasi tentang tata cara penggunaan kartu Jamkesmas melalui kampanye sosial.